



Laporan Akhir

Kajian Faktor Sosial Ekonomi yang Berdampak pada Usia Perkawinan Pertama di Provinsi Gorontalo

Tim Peneliti:

**Prof. Dr. Ramli Utina, M.Pd
Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M.Si
Yayu Isyana Pongoliu, SE, M.Sc**

**Kerjasama
BKKBN Provinsi Gorontalo
dengan IPADI Provinsi Gorontalo
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kependudukan merupakan salah satu isu penting yang terus menjadi perhatian bagi banyak kalangan pada hari. Meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu daerah akan membawa dampak bagi berbagai sisi aspek kehidupan manusia. Jika pertumbuhan penduduk secara kuantitas tidak disertai dengan peningkatan kualitas manusia maka hal ini dapat menimbulkan beban dan masalah baru bagi pembangunan. Upaya untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan akan terhambat oleh lajunya tingkat pertumbuhan yang tinggi. Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia menunjukkan tren peningkatan jumlah penduduk dari masa ke masa. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk (Jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Persen)
Prov. Gorontalo 2007-2011

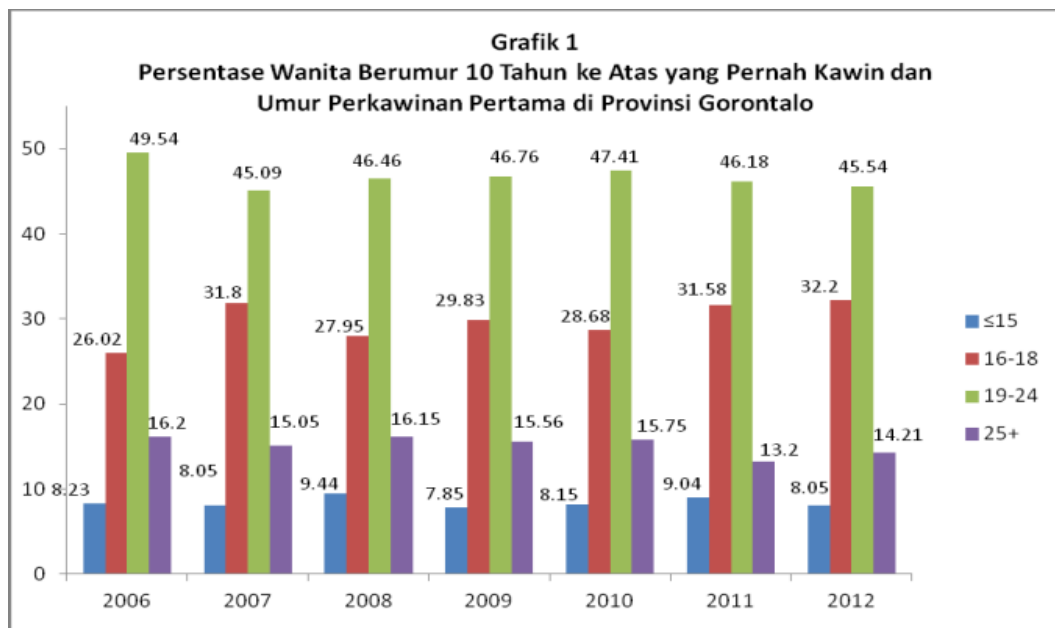
Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
(1)	(2)	(3)
2007	960.335,00	N/A
2008	972.208,00	N/A
2009	983.952,00	N/A
2010	1.040.164,00	N/A
2011	1.062.883,00	2,18

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo

Permasalahan tentang kependudukan akan membawa pada angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yang besar. Angkatan kerja yang produktif harus memelihara beban atau tanggungan yang besar dari penduduk berusia lanjut dan anak-anak. Pada tahun 2012 provinsi Gorontalo memiliki nilai *dependency ratio* sebesar 55.99 (BPS provinsi Gorontalo). Artinya pada tiap 100 penduduk harus menanggung 56 penduduk yang tidak produktif. Jika nilai *dependency ratio* terus meningkat maka akan membawa dampak negatif untuk kependudukan.

Salah satu faktor yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah umur perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama adalah umur menikah pertama kali seorang perempuan melalui ikatan pernikahan secara hukum dan biologi yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan (BPS). Umur perkawinan pertama memiliki hubungan negatif dengan fertilitas. Jika semakin muda umur perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksi atau semakin banyak anak yang akan dilahirkan. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Data umur perkawinan pertama Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, wanita di Provinsi Gorontalo secara umum menikah pertama kali pada usia 19-24 tahun (> 45%). Namun demikian, proporsi wanita yang menikah diusia 16-18 tahun juga masih relatif tinggi (sekitar 30%).



Sumber: Factsheet BKKBN Provinsi Gorontalo

Usia perkawinan pertama memiliki resiko terhadap persalinan yang akan dialami oleh perempuan baik jika terlalu muda maupun terlalu tua. Semakin muda usia kawin pertama maka akan semakin besar pula resiko yang akan dihadapi baik oleh ibu maupun anaknya nanti. Resiko yang sama pun berlaku jika usia kawin pertama seorang wanita semakin tua. Resiko yang ditimbulkan dari usia kawin pertama tidak hanya bersifat medik dan menyangkut keselamatan fisik ibu dan anak tetapi juga tentang kualitas

sumber daya manusia generasi mendatang yang dihasilkan (Sriudiyani, 2011)

Usia perkawinan pertama terutama bagi perempuan menjadi gambaran perubahan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Dengan berbagai dampak dan risiko yang ditimbulkan dari usia perkawinan pertama terutama yang terlalu muda maka kebijakan untuk pendewasaan usia perkawinan sangat penting untuk dilakukan. Pendewasaan usia perkawinan agar calon pasangan suami dan istri dapat merencanakan keluarga tidak hanya untuk aspek fisik tetapi juga mental dan emosional.

Kajian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas aspek sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama. Faktor sosial ekonomi adalah salah satu faktor yang menentukan usia perkawinan pertama. Pada negara-negara maju telah terjadi pergeseran sosial terhadap institusi pernikahan sehingga mengakibatkan menikah menjadi pilihan hidup pribadi individu. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi yang terjadi pada negara-negara yang masih berkembang dimana dalam pandangan sosial institusi pernikahan dipandang sebagai institusi yang sakral dan menjadi kebutuhan sosial masyarakat.

Demikian juga dengan perubahan struktur ekonomi yang membawa dampak bagi perekonomian suatu negara telah merubah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Pada beberapa

tahun terakhir dengan semakin tingginya biaya hidup, terbukanya kesempatan dan lapangan pekerjaan serta pendidikan bagi perempuan telah merubah persepsi dan keputusan untuk menikah pertama kali. Sehingga dapat disimpulkan pergeseran dan perubahan aspek sosial ekonomi dalam masyarakat dapat mempengaruhi usia perkawinan pertama terutama bagi perempuan.

Beberapa aspek sosial ekonomi yang akan digunakan pada kajian ini menggunakan beberapa variabel sebagai berikut, yaitu; tingkat pendidikan orang tua dan suami/istri, jenis serta status pekerjaan orang tua dan suami/istri, pendapatan orang tua dan suami/istri, suku, tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan).

B. Perumusan Masalah

Ada beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi usia perkawinan pertama (UKP) diantaranya adalah faktor sosial dan ekonomi dari pasangan menikah tersebut. Faktor-faktor utama sosial ekonomi tersebut adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan serta pendapatan dari masing-masing individu.

Namun perbedaan wilayah, etnis maupun budaya pada masyarakat dapat menimbulkan perbedaan pada faktor-faktor sosial ekonomi tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi usia perkawinan pertama (UKP) di Provinsi Gorontalo.

C. Tujuan Analisis

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan kajian ini adalah memberikan gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana aspek sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama di Provinsi Gorontalo.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara kuantitatif dan kualitatif seberapa besar pengaruh aspek sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama di Provinsi Gorontalo.

D. Manfaat

Kajian ini akan memberikan strategi dan rekomendasi bagi instansi terkait terutama BKKBN dalam menyusun kebijakan yang diarahkan untuk pendewasaan usia perkawinan pertama pada masyarakat Gorontalo. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak BKKBN dapat tepat sasaran dalam penyusunan program pendewasaan usia perkawinan pertama.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu kajian empiris yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi untuk dapat menganalisis faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi usia perkawinan pertama.

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Konseptual

2.1.1. Definisi Perkawinan di Indonesia

Perkawinan adalah suatu ritual yang dihadapi manusia dalam kedewasaannya untuk dapat berhubungan dengan lawan jenis untuk waktu yang lama dilandasi dengan suatu rasa antara kasih kepada orang lain dan disahkan oleh negara. Perkawinan menghubungkan dua orang dengan berbeda sifat dan watak yang dimilikinya, dan ikatan perkawinan tersebut menimbulkan akibat yaitu hubungan lahiriah; spiritual, dan kewajiban antara pribadi dan kemasyarakatan.

Menurut Wirjono (1984) perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan. Selanjutnya, Paul dan Chester (1991), perkawinan adalah suatu pola sosial yang disetujui dengan cara mana dua orang atau lebih membentuk keluarga, dengan kata lain perkawinan adalah penerimaan status baru serta pengakuan atas status baru oleh orang lain. Nani (1970) mengemukakan pengertian perkawinan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud akan hidup bersama dengan kekal antara dua orang yang berjenis kelamin yang berlainan dan dilangsungkan menurut cara-cara yang ditetapkan pemerintah, perkawinan mana berdasarkan hukum sipil dan berazaskan monogami.

Di Indonesia, agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah "ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ikatan lahir, yaitu hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana mengikat kedua pihak, dan pihak lain dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang mengikat kedua pihak saja.

Asmin (1974) menyatakan ikatan lahir batin berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil sebagai suami-istri baik bagi mereka maupun dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan batin suami istri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ada ikatan lahir atau ikatan batin saja, kedua unsur tersebut harus ada dalam setiap perkawinan, karena ikatan perkawinan bukan hanya semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu belaka.

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka terdapat lima unsur didalamnya, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin;

Bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri yang dimulai dengan adanya akad atau perjanjian yang dilakukan secara formal, menurut aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian hubungan hukum itu nyata, baik bagi pihak-pihak itu sendiri atau bagi pihak ketiga. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini diukur dengan agama dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita;

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi.

3. Sebagai suami istri;

Seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat *intern* maupun *extern*. Syarat *intern* adalah yang menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan yaitu: kecakapan mereka, kesepakatan mereka, dan juga adanya izin

dari pihak yang lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat-syarat *extern* adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan.

4. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Keluarga dimaksud disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin.

Dari rumusan pasal I Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974, jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan

keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua. (Hilman, 1990)

2.1.2. Pengertian Usia Kawin Pertama

Usia kawin adalah usia ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (perkawinan pertama). Masalah pernikahan adalah merupakan salah satu bagian dari masalah kependudukan yang perlu ditangani secara serius, hal ini disebabkan karena pernikahan akan menimbulkan masalah baru dibidang kependudukan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan.

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi tingkat produktifitas pada pasangan usia subur. Meningkatnya usia kawin akan dapat memberikan sumbangan pada penurunan angka kelahiran. Bagi masyarakat Indonesia, perkawinan dipandang sebagai perilaku yang bersifat universal dalam arti bahwa kebanyakan penduduk akan melangsungkan pernikahan. Salah satu ciri perkawinan Indonesia adalah pelaksanaan terjadi pada usia yang masih cukup muda terutama bagi wanita di pedesaan atau pinggiran kota.

Usia perkawinan yang rendah bagi seorang wanita berarti akan memperpanjang masa untuk melahirkan. Seorang wanita mempunyai masa subur pada usia 15-49 tahun. Wanita yang menikah pada usia tua yaitu pada pertengahan atau mendekati umur 30 tahun atau lebih, cenderung mempunyai anak lebih sedikit dari wanita yang menikah pada usia muda (Anomin, 1995). Usia wanita saat perkawinan pertama dapat mempengaruhi

resiko melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak, karena disebabkan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siap mental dalam berumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan.

Umur wanita ketika kawin pertama yang berarti saat dimulainya masa reproduksinya pembuahan. Hubungan antara Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk suatu daerah.

Umur kawin pertama adalah waktu pertama kali sepasang suami istri melakukan hubungan intim. Rata-rata kawin pertama di Indonesia menurut beberapa data menunjukkan masih cukup rendah, yaitu di bawah 20 tahun. Perkawinan pertama di bawah 20 tahun secara kesehatan reproduksi bisa dikatakan masih terlalu muda, secara mental-sosial belum siap dan secara ekonomi juga biasanya belum mapan (pkpp.ristek.go.id)

2.2 Faktor yang Mempengaruhi Usia Perkawinan Pertama

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seorang wanita atau pria yang belum menikah untuk mempercepat perkawinan pertamanya sebagai berikut:

a. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Perkawinan usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan. Suatu masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia masih muda (Sekarningrum, 2002).

b. Faktor sosial budaya dan adat istiadat

Keadaan sosial budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi besar kecilnya keluarga. Norma-norma yang berlaku di masyarakat seringkali juga mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai anak banyak atau sedikit. Hal ini dapat ditunjukkan konsep-konsep yang berlaku di masyarakat, misalnya “banyak anak banyak rejeki”, garis keturunan dan warisan yang melekat pada jenis kelamin tertentu.

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU (Ahmad, 2009).

c. Faktor Pekerjaan

Status pekerjaan dalam suatu tatanan masyarakat dapat mengindikasikan gambaran ekonomi pada suatu wilayah. Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dapat menggambarkan keadaan ekonomi yang berkembang dan maju dalam suatu kawasan daerah.

Kepemilikan atas suatu pekerjaan menjadi indikator ekonomi seseorang dalam tatanan hirarki masyarakat. Secara umum pekerjaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan vesar yaitu *low-prestige occupations* (Blue collar jobs); *medium-prestige occupations* (white-collar jobs) dan *high prestige occupations*. Jenis pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan tetap dan penghasilan keluarga.

d. Faktor domisili tempat tinggal

Status tempat tinggal dapat dikelompokkan dalam kategori desa atau

kota maupun daerah tertinggal atau maju. Biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan atau maju lebih besar daripada yang tinggal di daerah pedesaan maupun tertinggal. Hal ini akan membawa dampak pada pola pikir untuk meningkatkan status sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mempengaruhi keputusan untuk menikah.

Status tempat tinggal dapat memberikan perbedaan orientasi nilai tentang perkawinan bagi seseorang. Pada masyarakat yang lebih maju institusi pernikahan yang akan melahirkan generasi berikutnya lebih dinilai pada kualitas yang akan dihasilkan terutama untuk memenuhi biaya sosial ekonomi dari anak tersebut. Anak tidak akan dipandang sebagai barang produksi atau sebatas kuantitas yang diharapkan dapat membantu orang tua ketika mereka sudah tidak produktif lagi (Becker, 1995).

2.3 Usia Pendewasaan Perkawinan

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar kehamilan pertamapun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus diusahakan apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka penundaan kelahiran anak pertama harus

dilakukan. Dalam istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu. Pendewasaan usia perkawinan merupakan bagian dari program Keluarga Berencana Nasional. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan Total Fertility Rate (TFR). (Mardiya, 2010).

Pendewasaan usia perkawinan diperlukan karena dilatarbelakangi beberapa faktor yakni:

- a. Semakin banyaknya kasus perkawinan usia muda
- b. Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan
- c. Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan pertumbuhan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa).
- d. Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian (BKKBN, 2011).

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

Program Pendewasaan Usia kawin dan Perencanaan Keluarga merupakan kerangka dari program pendewasaan usia perkawinan. Kerangka ini terdiri dari tiga masa reproduksi, yaitu:

1) Masa menunda perkawinan dan kehamilan

Kelahiran anak yang baik, adalah apabila dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 tahun. Kelahiran anak, oleh seorang ibu dibawah usia 20 tahun akan dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak yang bersangkutan. Oleh sebab itu sangat dianjurkan apabila seorang perempuan belum berusia 20 tahun untuk menunda perkawinannya. Apabila sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri yang masih dibawah usia 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan, dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti yang akan diuraikan dibawah ini. Beberapa alasan medis secara objektif dari perlunya penundaan usia kawin pertama dan kehamilan pertama bagi istri yang belum berumur 20 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi rahim dan panggul belum berkembang optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian pada saat persalinan, nifas serta bayinya.
- b. Kemungkinan timbulnya risiko medik sebagai berikut:
 1. Keguguran
 2. Preeklamsia (tekanan darah tinggi, cedema, proteinuria)
 3. Eklamsia (keracunan kehamilan)
 4. Timbulnya kesulitan persalinan

5. Bayi lahir sebelum waktunya
6. Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)
7. Fistula Vesikovaginal (merembesnya air seni ke vagina)
8. Fistula Retrovaginal (keluarnya gas dan feses/tinja ke vagina)
9. Kanker leher Rahim

Penundaan kehamilan pada usia di bawah 20 tahun ini dianjurkan dengan menggunakan alat kontrasepsi sebagai berikut:

- a. Prioritas kontrasepsi adalah oral pil, oleh karena peserta masih muda dan sehat.
- b. Kondom kurang menguntungkan, karena pasangan sering bersenggama (frekuensi tinggi) sehingga akan mempunyai kegagalan tinggi.
- c. AKDR/Spiral/IUD bagi yang belum mempunyai anak merupakan pilihan kedua. AKDR/Spiral/IUD yang digunakan harus dengan ukuran terkecil.

2) Masa menjarangkan kehamilan

Masa menjarangkan kehamilan terjadi pada periode PUS berada pada umur 20-35 tahun. Secara empirik diketahui bahwa PUS sebaiknya melahirkan pada periode umur 20-35 tahun, sehingga resiko-resiko medik yang diuraikan di atas tidak terjadi. Dalam periode 15 tahun (usia 20-35 tahun) dianjurkan untuk memiliki 2 anak. Sehingga jarak ideal antara dua kelahiran bagi PUS kelompok ini adalah sekitar 7-8 tahun. Patokannya adalah jangan terjadi dua balita dalam periode 5 tahun. Untuk menjarangkan

kehamilan dianjurkan menggunakan alat kontrasepsi. Pemakaian alat kontrasepsi pada tahap ini dilaksanakan untuk menjarangkan kelahiran agar ibu dapat menyusui anaknya dengan cukup banyak dan lama. Semua kontrasepsi yang dikenal sampai sekarang dalam program Keluarga Berencana Nasional pada dasarnya cocok untuk menjarangkan kelahiran. Akan tetapi dianjurkan setelah kelahiran anak pertama langsung menggunakan alat kontrasepsi spiral (IUD).

3) Masa mencegah kehamilan.

Masa pencegahan kehamilan berada pada periode PUS berumur 35 tahun keatas. Sebab secara empirik diketahui melahirkan anak diatas usia 35 tahun banyak mengalami resiko medik. Pencegahan kehamilan adalah proses yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang akan dipakai diharapkan berlangsung sampai umur reproduksi dari PUS yang bersangkutan yaitu sekitar 20 tahun dimana PUS sudah berumur 50 tahun. Alat kontrasepsi yang dianjurkan bagi PUS usia diatas 35 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Pilihan utama penggunaan kontrasepsi pada masa ini adalah kontrasepsi mantap (MOW, MOP).
- b. Pilihan ke dua kontrasepsi adalah IUD/AKDR/Spiral
- c. Pil kurang dianjurkan karena pada usia ibu yang relatif tua mempunyai kemungkinan timbulnya akibat sampingan.

2.4 Faktor yang Menentukan Sosial Ekonomi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat yaitu :

1. Tingkat pendidikan

Makna pendidikan secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat atau kebudayaan. Bagaimana sederhananya peradaban suatu masyarakat di dalamnya terjadi atau berlangsung suatu proses pendidikan. Pendidikan telah ada sepanjang peradaban manusia. Pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya manusia melestarikan hidupnya (Vaizey,1989: 64).

Seseorang yang telah mengecap pendidikan diharapkan kepribadian, kemampuan dan keterampilannya semakin baik sehingga ia dapat bergaul dan beradaptasi di tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Hal ini akan mempermudah seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Abdullah, 1993 : 327).

2. Jenis pekerjaan

Manusia sebagai makhluk hidup, adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. Manusia disebut juga makhluk yang tidak bisa diam dan disebut orang yang suka bekerja. Adapun motivasi seseorang bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga karena pada dasarnya manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan

pokok (*basic human needs*) seperti makanan, pakaian, sandang dan papan dan kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, alat hiburan dan lain-lainnya (Mulyanto,1995 : 2).

3. Tingkat pendapatan

Pendapatan merupakan sesuatu yang diperoleh dari pekerjaan pokok, yang diperoleh dari pekerjaan sampingan dan yang diperoleh dari usaha subsistem dari semua anggota rumah tangga (Mulyanto, 1995:257). Untuk memperoleh pendapatan/penghasilan, manusia harus bekerja dalam bentuk dan jenis apapun. Namun jika ditinjau dari pendapatan pribadi dengan pengukuran pendapatan perkapita maka dapat dikatakan bahwa pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan sesuatu kegiatan apapun termasuk pendapatan.

Pendapatan rumah tangga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perorangan dalam rumah tangga (Budihardjo, 2005 : 122).

4. Keadaan rumah tangga

5. Tempat tinggal

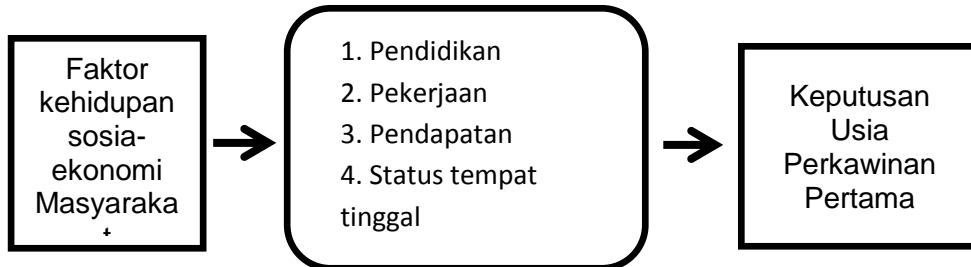
6. Kepemilikan kekayaan

7. Jabatan dalam organisasi

8. Aktivitas ekonomi

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas di atas maka berikut ini kerangka pemikiran dalam kajian ini disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Pada kehidupan masyarakat terdapat unsur-unsur utama yang menentukan keputusan untuk menikah yaitu tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan dan status tempat tinggal seseorang. Berdasarkan faktor-faktor sosial ekonomi tersebut di atas maka hal ini yang dianalisis dampak pengaruhnya pada usia perkawinan seseorang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Analisis

Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Adapun maksud dari kajian ini untuk memberikan penjelasan dan uraian berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kajian sosial ekonomi terhadap usia kawin pertama. Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang berdasarkan fakta yang ada dan usaha mengemukakan hubungannya satu dengan yang lain, ini dilakukan untuk mengetahui faktor sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama yang terjadi di masyarakat. Dari hasil pendataan dilakukan analisis untuk pemecahan masalah yang ditimbulkan serta menguji konsep solusi yang relevan.

Kajian ini terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pertama pengumpulan data primer dan sekunder; tahap kedua analisis data kuantitatif dan kualitatif.

Tipe kajian ini adalah suatu studi kasus tentang pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama di suatu daerah. Menetapkan dan menerapkan suatu solusi dan kebijakan melalui dukungan dari peraturan perundangan, *stakeholder* terkait dan masyarakat sekitar sebagai pengambil kebijakan dan pemakai jasa lingkungan dapat merumuskan skala

prioritas penanganan terhadap dampak pada usia perkawinan pertama yang disebabkan oleh berbagai faktor, terutama yang disebabkan oleh faktor sosial ekonomi.

3.2. Teknik Analisis

1. Sumber data kuantitatif berupa catatan hasil observasi, dan dokumen-dokumen terkait permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap perkawinan pertama di suatu daerah. Data yang diperoleh di analisis menggunakan teknik sederhana yang memenuhi syarat asumsi klasik untuk setiap data temuan.
2. Sumber data kualitatif berupa transkrip interviu mendalam (*depth interview*) dan dokumen tertulis yang diperoleh dari dinas dan instansi terkait yang memiliki hubungan erat dengan kajian penelitian. Data yang diperoleh dianalisis kembali secara deskriptif. Hasil dari temuan ini dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sukmadinata (2009) dalam penelitian populasi dibedakan menjadi 2, yaitu: populasi secara umum dan populasi target (*target population*). Populasi

target adalah populasi yang menjadi sasaran keterbelakangan kesimpulan penelitian ini.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, dan secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan. Kajian dengan menggunakan sampel lebih menguntungkan dibandingkan dengan penelitian menggunakan populasi, karena kajian dengan menggunakan sampel lebih menghemat biaya, waktu dan tenaga (Sukmadinata, 2009). Langkah awal yang harus ditempuh dalam menentukan sampel adalah membatasi jenis populasi atau menentukan populasi target. Penentuan sampel bersifat purposif, dengan memperhatikan ciri-ciri tertentu dari informan. Namun peneliti menambahkan teknik *Snowball* dalam mendapatkan informasi dari sampel yang diinginkan.

Dalam kajian ini yang menjadi populasi target adalah data kependudukan dan kondisi faktor sosial ekonomi yang berdampak pada usia perkawinan pertama di Provinsi Gorontalo, sedangkan sampel kajian di wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Pengambilan wilayah sampel kabupaten dan kota menggunakan metode *purposive sampling*. Dari masing-masing kabupaten dan kota dipilih responden kajian melalui *simple random sampling* dimana masing-masing sebanyak 50 responden per wilayah kabupaten/kota.

3.4. Penentuan Lokasi

Kajian ini dilaksanakan di tiga daerah di Provinsi Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Bone Bolango. Alasan

dipilihnya tiga daerah sebagai lokasi kajian adalah; Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi banyak mengalami perkembangan terutama pertumbuhan penduduk. Untuk Kabupaten Bone Bolango merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan penduduk, hal yang paling krusial yang terjadi dimana di Kabupaten Bone Bolango terindikasi terdapat satu wilayah yang usia perkawinan pertamanya sangat tinggi. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo memiliki luas wilayah dan tingkat kepadatan penduduk terpadat setelah Kota Gorontalo. Analisis secara deskriptif akan memberikan satu solusi tentang kebijakan yang diarahkan untuk pendewasaan usia perkawinan pertama pada masyarakat di Provinsi Gorontalo.

3.5. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dapat digolongkan dalam data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari narasumber/responden. Data primer yang berhubungan dengan berbagai faktor sosial ekonomi yang berdampak pada usia perkawinan pertama diperoleh dari pengisian kuisioner yang disebarkan kepada pasangan keluarga, wawancara mendalam dan observasi serta pengamatan langsung di lapangan. Metode pengumpulannya juga menggunakan dokumentasi.

- b. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yang terlibat dalam lingkup kajian, yaitu BKKBN Provinsi Gorontalo, BPS Kota Gorontalo, BPS Bone Bolango, BPS Kabupaten Gorontalo, dan BPS Provinsi Gorontalo. Data yang dikumpulkan berupa data a) usia perkawinan pertama, b) kebutuhan ekonomi; pendapatan dan tingkat kebutuhan, c) tingkat pendidikan, d) status bekerja pada saat pertama kali menikah, e) status tempat tinggal dan f) Data lain yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian terdahulu yang mendukung untuk membuat deskripsi dari kajian ini.

3.6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Dalam editing yang akan dikerjakan adalah meneliti: lengkap tidaknya kuesioner yang akan di isi, keterbacaan tulisan, kejelasan makna jawaban, kesuaian atau keajekan antara pertanyaan yang satu dengan yang lain. Setelah proses editing, dilakukan proses coding, yaitu mengklasifikasikan jawaban responden menurut macamnya. Kemudian untuk melihat kategori atau klasifikasi data tersebut, dibuat deksriptifnya.

Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 16. Hal ini untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap usia kawin pertama (UKP). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$UKP = \beta_0 + \beta_1 Pndkn + \beta_2 D_{pkjn} + \beta_3 D_{Ttg} + e$$

Dimana

1. UKP adalah usia kawin pertama. Perhitungan menggunakan umur responden pada saat pertama kali menikah.
2. Pndkn adalah lama pendidikan responden. Variabel ini diukur dengan menggunakan lama tahun responden berada di bangku pendidikan sejak SD sampai bangku perguruan tinggi strata satu.
3. DPKjn adalah dummy status bekerja responden sebelum menikah. Jika responden menjawab memiliki pekerjaan sebelum menikah diberi nilai 1 (satu) dan jika tidak diberi nilai 0 (nol).
4. Dttg adalah dummy domisili. Merupakan domisili tempat tinggal responden. Jika responden bertempat tinggal di wilayah kota maka diberi nomor 1 (satu), jika diluar kota diberi nomor 0 (nol).

3.7. Definisi Operasional

1. Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Usia Perkawinan Pertama adalah ketika seseorang memulai atau melangsungkan pernikahan (perkawinan pertama)
3. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai

usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

4. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang hidup dalam satuan luas suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
5. Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan. Variabel ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan proksi pekerjaan responden. Akses seseorang kesempatan lapangan kerja dapat menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah.

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Jumlah responden pada penelitian ini adalah sebanyak 150 orang dengan target responden adalah kalangan perempuan yang telah menikah. Jumlah sampel sebanyak 150 orang ini tersebar di daerah Kota Gorontalo, kabupaten Gorontalo dan kabupaten Bone Bolango dengan masing-masing responden sebanyak 50 orang per wilayah kota/kabupaten. Namun ada dua kuesioner yang tidak dapat digunakan untuk analisis penelitian karena kurang lengkapnya data.

Gambaran umum sampel data penelitian dapat dilihat pada statistik deskriptif penelitian. Beberapa data dikumpulkan melalui kuesioner untuk dapat memberi gambaran tentang beberapa faktor sosial ekonomi yang akan diteliti. Selain faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi usia kawin pertama (UKP), data yang dikumpulkan juga meliputi latar belakang responden dan beberapa faktor lain yang dapat menjelaskan faktor sosial ekonomi tersebut. Adapun beberapa variabel yang dijelaskan adalah usia kawin pertama (UKP), tingkat pendidikan, status bekerja sebelum menikah, domisili asal, usia pasangan saat menikah, tingkat pendidikan pasangan, status bekerja sebelum menikah, jumlah anak dan pengetahuan akan KB.

Beberapa faktor dijelaskan dengan membagi sampel kedalam masing-masing kota/kabupaten. Adapun penjelasan secara deskriptif adalah sebagai berikut:

a. Usia kawin pertama (UKP)

Berdasarkan UU 1/1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa batas menikah bagi perempuan adalah 16 tahun. Berdasarkan hal tersebut rentang usia kawin pertama dibagi dalam beberapa rentang. Usia kawin pertama responden disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Usia Kawin Pertama Responden

No	Usia kawin pertama	Jumlah (dalam Orang)	Persentase (%)
1	15 tahun dan kurang	10	6,8
2	16 tahun	11	7,4
3	17-18 tahun	40	27,0
4	19-24 tahun	65	43,9
5	25 tahun dan lebih	22	14,9
Total		148	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan UKP paling banyak terjadi pada rentang usia 19-24 tahun yang memiliki persentase sebesar 43,9%. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden telah memenuhi persyaratan dasar UU perkawinan bagi umur menikah perempuan. Untuk pernikahan yang terjadi dibawah 19 tahun sebesar 41,2 %. Berdasarkan UU pernikahan bagi perempuan usia 16 tahun sudah layak untuk menikah.

Namun perubahan dalam struktur masyarakat sekarang ini mendorong pada adanya usaha untuk meningkatkan umur kawin pertama yang telah ditetapkan. Seseorang dengan usia 16 tahun harusnya masih menduduki tingkat pendidikan pada level sekolah menengah umum. Sehingga hal ini dapat menjadi kajian yang harus diperhatikan. Sebaran usia kawin pertama berdasarkan wilayah disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sebaran Usia Kawin Pertama Berdasarkan Wilayah Penelitian

No	Kota/ Kabupaten	Usia Kawin Pertama (Jumlah dalam orang)					Total (Orang)
		15 tahun dan kurang	16 Tahun	17-18 Tahun	19-24 Tahun	25 Tahun keatas	
1	Kota Gorontalo	2	2	12	25	9	50
2	Kab Bone Bolango	4	4	15	21	5	49
3	Kab Gorontalo	4	5	13	19	8	49
Total		10	11	40	65	22	148

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan sebaran data per wilayah kabupaten dan desa menunjukkan bahwa persentase terbesar usia kawin pertama ada pada daerah kota Gorontalo disusul dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Data usia kawin pertama (UKP) responden menunjukkan sebagian besar responden telah menikah diatas batas usia perempuan yang telah ditetapkan oleh UU perkawinan. Akan tetapi dari data yang diperoleh ada juga yang menikah di bawah usia yang telah ditentukan bagi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara

mendalam (*depth interview*) dengan responden di wilayah Kabupaten Gorontalo yakni di Desa Bulila, remaja (AR) alasan menikah pada usia muda disebabkan telah hamil.

b. Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang akan membawa dampak bagi kesempatan bekerja dan mendapat penghidupan yang lebih baik. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik ditunjukkan melalui keberhasilan tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin lama seseorang berada pada jenjang pendidikan dapat menunda kebutuhan untuk menikah. Pada lingkungan masyarakat kota atau maju, tingkat pendidikan termasuk dalam biaya sosial ekonomi yang termasuk tinggi. Hal ini karena pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi bagi generasi masyarakat selanjutnya. Data pendidikan responden yang telah diselesaikan berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Tingkat pendidikan responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (dalam Orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	4	2.7
2	Tamat SD	50	33.8
3	Tamat SMP	48	32.4
4	Tamat SMU	35	23.6
5	DI/DII/DIII dan sederajat	6	4.1
6	S1	5	3.4
Total		148	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan sebagian besar responden hanya mencapai bangku pendidikan sampai pada tingkat menengah pertama. Sebanyak 33.8% dari jumlah responden hanya menamatkan pendidikan pada Sekolah Dasar (SD). Adapun responden yang melanjutkan studi sampai pada jenjang perguruan tinggi adalah hanya sebanyak 7.5%.

Berdasarkan data dari responden 68.9 % responden belum menempuh jenjang pendidikan sebagaimana yang menjadi kebutuhan mendasar sektor tenaga kerja sekarang ini maupun program pemerintah untuk belajar selama 12 tahun. Hal ini tentu saja akan berkaitan erat tidak hanya pada keputusan yang dilakukan responden untuk kehidupannya sendiri tetapi juga dapat dijadikan prediksi untuk generasi masa datang yang dihasilkan.

Beberapa program pemerintah terkait pendidikan terkait wajib belajar harus dapat disosialisasikan dan dimonitoring agar dapat mengurangi kasus anak maupun remaja yang putus sekolah. Tingkat pendidikan responden berdasarkan sebaran wilayah disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Sebaran Tingkat Pendidikan Responden Berdasarkan Penelitian

No	Kota/Kabupaten	Tingkat Pendidikan						Total
		Tidak tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMU	DI/DII/DI II/ sederajat	S1	
1	Kota Gorontalo	0	15	14	17	2	2	50
2	Kab Bone Bolango	0	26	16	5	1	1	49
3	Kab Gorontalo	4	9	18	13	3	2	49
Total		4	50	48	35	6	5	148

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango memiliki responden dengan tingkat pendidikan hanya tamat SD terbanyak dibandingkan dengan kota Gorontalo dan kabupaten Gorontalo. Secara geografis kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo masih memiliki beberapa daerah dengan keterbatasan infrastruktur seperti jalan maupun listrik walaupun berlokasi tidak jauh dari kota Gorontalo. Hal ini dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi akses terhadap pendidikan yang dapat ditempuh oleh masyarakat.

c. Status bekerja

Variabel status bekerja adalah apakah responden telah memiliki pekerjaan tetap saat sebelum melakukan pernikahan. Status sudah memiliki pekerjaan nantinya akan berhubungan dengan pendapatan yang akan diterima untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Status pekerjaan yang akan menentukan besaran pendapatan ini menentukan kualitas biaya sosial ekonomi yang harus dikeluarkan oleh keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dapat dianggap sebagai indikator bagi keadaan dan struktur ekonomi dalam suatu masyarakat. Semakin mudah akses terhadap pekerjaan maka menunjukkan semakin baik kondisi ekonomi dari suatu wilayah. Responden perempuan yang memiliki pekerjaan saat menikah disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Responden Perempuan Yang Memiliki Pekerjaan Saat Menikah

No	Status bekerja saat menikah	Jumlah (dalam Orang)	Persentase (%)
1	Sudah bekerja	37	25
2	Belum bekerja	111	75
Total		148	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, menunjukkan sebanyak 75% dari total responden menyatakan bahwa mereka belum memiliki pekerjaan saat menikah. Hal ini berhubungan dengan jenjang pendidikan responden yang sebagian besar hanya menamatkan pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama. Selain data tentang status bekerja dari responden perempuan hasil menunjukkan status kepemilikan pekerjaan yang dimiliki oleh pasangan responden menunjukkan pada saat menikah pasangan responden yang telah memiliki pekerjaan adalah sebanyak 73%. Sisanya sebanyak 27% menyatakan belum memiliki pekerjaan saat menikah.

Data kepemilikan pekerjaan oleh pasangan tidak dimasukkan dalam model analisis kajian ini tetapi hanya digunakan sebagai data pembanding kondisi responden. Namun berdasarkan data yang didapatkan tersebut peneliti memiliki pertanyaan lanjutan tentang apakah status suami bekerja dalam yang menentukan keputusan untuk menikah

bagi perempuan walaupun yang bersangkutan belum memiliki pekerjaan. Hal ini dapat didukung dengan kondisi sosial budaya masyarakat maupun agama yang dianut yang mengarahkan cukup laki-laki yang memiliki pekerjaan atau sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Responden laki-laki yang memiliki pekerjaan saat menikah disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Responden Laki-Laki Yang Memiliki Pekerjaan Saat Menikah

No	Status bekerja saat menikah	Jumlah (dalam Orang)	Persentase (%)
1	Sudah bekerja	108	73
2	Belum bekerja	40	27
Total		148	100

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.6, menunjukkan sebaran wilayah responden yang menyatakan telah memiliki pekerjaan sebelum menikah paling rendah berada di kabupaten Gorontalo dengan jumlah responden sebesar 14% dari total responden. Sedangkan kota Gorontalo dan kabupaten Bone Bolango memiliki jumlah responden dengan status menikah yang sama banyak dan lebih tinggi daripada kabupaten Gorontalo. Sebaran wilayah responden perempuan berdasarkan status memiliki pekerjaan saat menikah disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7. Sebaran wilayah responden berdasarkan status memiliki pekerjaan saat menikah (perempuan)

No	Kota/Kabupaten	Status bekerja sebelum menikah		Total
		Ya	Tidak	
1	Kota Gorontalo	15	35	50
2	Kab Bone Bolango	15	34	49
3	Kab Gorontalo	7	42	49
Total		37	111	148

Sumber : Data Primer, 2014

d. Tempat tinggal

Daerah atau wilayah yang dengan pembagian kota-desa maupun daerah tertinggal atau maju memiliki perbedaan sosial ekonomi yang berbeda. Hal ini terkait dengan persepsi dan pola pikir yang terbentuk dari keadaan sosial ekonomi maupun biaya sosial ekonomi yang berbeda antara perbedaan daerah atau wilayah tersebut.

Biaya sosial ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat pada daerah kota maupun yang maju lebih besar ketimbang pada daerah desa maupun tertinggal. Pemenuhan pendidikan, pekerjaan maupun perumahan sehingga orientasi masyarakat akan berubah. Sehubungan dengan usia kawin pertama, individu pada daerah perkotaan dan maju akan cenderung memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial ekonominya agar lebih berkualitas sehingga ketika memasuki institusi pernikahan dan memiliki anak sudah dalam

kondisi yang stabil dan cukup. Status domisili responden disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Status Domisili Responden Pada Lokasi Penelitian

No	Status domisili	Jumlah (dalam Orang)	Persentase (%)
1	Domisili kota	50	33.8
2	Domisili luar kota	98	66.2
Total		48	100

Sumber: Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan, sebagian besar responden sebanyak 66.2% menempati wilayah di luar kota Gorontalo yaitu kabupaten Bone Bolango dan kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang wilayah tempat responden berada akan mengarah pada biaya sosial ekonomi maupun persepsi dalam institusi pernikahan.

4.2. Hasil analisis regresi berganda

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh aspek sosial dan ekonomi terhadap usia kawin pertama. Melalui pengujian ini dapat dijelaskan besarnya pengaruh aspek pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal terhadap usia perkawinan pertama. Hasil pengujian secara statistic disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Hasil Pengujian Penelitian secara Statistik

Variabel Dependen (UKP)	Variabel Independen
Model penelitian:	
$UKP = \beta_0 + \beta_1 Pndkn + \beta_2 D_{Pkjn} + \beta_3 D_{Ttg} + e$	
Konstanta	1.089
Pndkn	(31.272)
D_{Pkjn}	0.211
	(5.599)***
D_{Ttg}	0.026
N	(2.023)**
R Square (%)	0.014
Adjusted R Square (%)	(1.205)
F	
Sig	148
	0.232
	0.216
	14.461
	0.000

Keterangan: Angka pada baris merupakan koefisien. Angka dalam kurung pada baris kedua merupakan t-statistik.

***Signifikan pada $\alpha = 0.01$, **Signifikan pada $\alpha = 0.05$, *Signifikan pada $\alpha = 0.1$

Sumber : Data Primer, 2014

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas menunjukkan, hasil pengujian secara statistik untuk variabel pendidikan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap usia perkawinan pertama pada tingkat kepercayaan $\alpha = 1\%$. Variabel status bekerja yang dimiliki responden sebelum menikah juga memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap usia perkawinan pertama pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Sedangkan variabel tempat tinggal responden yakni apakah tinggal di wilayah kota atau desa tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap usia perkawinan pertama.

4.3 Pembahasan hasil penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama pada masyarakat Provinsi Gorontalo.

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat fertilitas. Perubahan penduduk dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi (Lucas, 1995). Karena itulah usaha menekan tingkat fertilitas harus dapat dilakukan dari akar penyebab tingginya angka fertilitas salah satunya adalah usia kawin pertama (UKP). Usia perkawinan pertama memiliki hubungan terbalik dengan tingkat fertilitas. Semakin muda usia kawin pertama seseorang (UKP) maka semakin tinggi tingkat fertilitas. Karena itulah penekanan pada isu usia kawin pertama (UKP) penting untuk dilakukan. Usia kawin pertama (UKP) tidak saja mempengaruhi tingkat fertilitas tetapi juga tingkat mortalitas bagi ibu-ibu melahirkan. Jika usia perkawinan wanita pada usia di bawah 20 tahun, dengan kondisi rahim dan panggul yang belum optimal, maka terjadi kemungkinan resiko medik, dengan keguguran serta kemungkinan kesulitan dalam persalinan yang bisa berakhir dengan kematian.

Salah satu kebijakan yang dilakukan terkait pengaruh usia kawin pertama (UKP) terhadap fertilitas ada pendewasaan usia perkawinan pertama. Namun keputusan kebijakan pendewasaan usia perkawinan

pertama hanya dapat dilakukan jika faktor-faktor yang mempengaruhi usia perkawinan pertama dapat diidentifikasi.

Aspek sosial ekonomi memiliki peranan penting dalam tataran masyarakat untuk pengambilan keputusan sehari-hari. Pada penelitian ini aspek sosial ekonomi utama yang dibahas adalah tingkat pendidikan dan pekerjaan pada masyarakat. Tingkat pendidikan seseorang yang semakin tinggi memberikan wawasan dan pengetahuan untuk memilih melanjutkan pendidikan dan mencari kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya sehingga akan menunda keputusan untuk menikah lebih awal. Bagi perempuan pendidikan yang lebih tinggi dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik sehingga seseorang dapat memasuki pernikahan dengan kondisi finansial, mental, pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik.

Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia pernikahannya. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia menikah pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah lanjutan tingkat pertamanya, berarti sekurang-kurangnya ia menikah pada usia di atas 16 tahun ke atas, bila menikah diusia lanjutan tingkat atas berarti sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan selanjutnya bila menikah setelah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berarti sekurang-kurangnya berusia diatas 22 tahun (Hanafi Hartono, 1996, 20).

Berdasarkan uraian di atas, telah menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi perilaku manusia dalam suatu masyarakat sehingga dapat merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional secara bertahap termasuk kebiasaan-kebiasaan menikah pada usia muda. Keadaan semacam ini sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, misalnya dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar wanita atau gadis yang akan dinikahkan dengan alasan ingin melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu. Pada keadaan lain, seorang wanita yang sudah dipinang dapat menunda pernikahannya dengan alasan masih sekolah.

Hasil penelitian ditemukan bahwa untuk variabel pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Usia Kawin Pertama (UKP) dimana setiap peningkatan 1% pada lamanya tingkat pendidikan seseorang maka usia kawin pertama akan mengalami peningkatan sebesar 21%. Hal ini berarti semakin meningkatnya jenjang pendidikan tinggi seseorang maka akan menunda usia kawin pertama. Hal ini ditegaskan oleh Wu (1988) menyatakan bahwa pada beberapa studi sosial terdapat sebuah teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin lama usia pernikahan pertamanya. Selanjutnya Vu (2005) dalam studi sosiologi terkait masalah usia pernikahan pertama dengan pendidikan menjelaskan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perkotaan dan mendapatkan pendidikan tinggi serta keterampilan yang memadai cenderung menikah di usia lebih dari 23 tahun. Jika seseorang perempuan mendapat pendidikan yang tinggi dan pekerjaan yang bagus dan layak, maka

perempuan akan cenderung terfokus akan pekerjaan dibandingkan dengan menikah, dan berkeluarga. Maka dari itu, beberapa tokoh dari teori modernisasi menyatakan bahwa pendidikanlah yang membuat perempuan di daerah perkotaan cenderung menikah lebih lambat dibandingkan dengan perempuan di pedesaan.

Aspek sosial ekonomi berikutnya adalah pekerjaan yang dimiliki oleh responden. Status pekerjaan dalam suatu masyarakat dapat menunjukkan situasi ekonomi masyarakat. Kemudahan dalam memperoleh kesempatan pekerjaan atau terbukanya lapangan pekerjaan yang banyak adalah indikator ekonomi dari suatu daerah atau suatu negara.

Kepemilikan pekerjaan oleh seorang wanita dapat membawa keputusan untuk menunda usia menikah. Untuk variabel status bekerja terlihat bahwa Usia Kawin Pertama (UKP) untuk wanita yang telah memiliki pekerjaan sebelum menikah 0.014 lebih tinggi daripada Usia Kawin Pertama (UKP) untuk wanita yang belum bekerja.

Variabel terakhir adalah tempat domisili dari para responden yaitu wilayah perkotaan atau diluar kota. Karakteristik geografi ini dapat menunjukkan aspek sosial ekonomi dalam masyarakat. Penduduk yang hidup di wilayah kota atau sudah berkembang biasanya memiliki pola pikir yang lebih maju dan ingin berkembang hal terkait biaya sosial ekonomi serta persepsi dari masyarakat yang telah berada di daerah kota atau maju. Tuntutan hidup yang lebih tinggi bagi penduduk kota atau daerah maju akan memaksa mereka memenuhi hal-hal yang dibutuhkan sebagai daya saing

seperti pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dapat terlihat dari tingginya biaya sosial ekonomi pada masyarakat yang berada pada wilayah kota atau maju. Dengan kondisi seperti tersebut diatas maka keputusan menikah akan ditunda sampai beberapa aspek diatas terpenuhi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel domisili kota maupun luar kota tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Usia Kawin Pertama (UKP). Walaupun demikian variabel asal tempat tinggal ini memiliki koefisien positif yang menunjukkan arah responden yang tinggal di kota memiliki Usia Kawin Pertama (UKP) lebih tinggi daripada yang berada diluar kota.

Terdapat beberapa hal yang harus dikaji dalam analisis sosial ekonomi terhadap usia kawin pertama. Aspek sosial ekonomi melibatkan intervensi pihak pemerintah selaku pengambil kebijakan yang dapat mengarahkan pola kehidupan yang dibangun masyarakat melalui pendidikan, akses terhadap lapangan kerja, maupun perkembangan teknologi dan informasi.

Berdasarkan UU perkawinan tahun 1974 tentang usia menikah pertama bagi perempuan adalah pada usia 16 tahun. Namun usia 16 tahun bagi seorang remaja berarti yang bersangkutan masih menempuh pendidikan tingkat menengah atas. Jika pendidikan yang ditempuh hanya pada tingkat menengah pertama akan menyulitkan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Jika mereka mendapatkan pekerjaan maka pekerjaan yang didapatkan belum memiliki posisi pendapatan yang cukup untuk dapat menopang perekonomian keluarga yang lebih berkualitas. Sehingga

beberapa aspek sosial ekonomi membutuhkan sinergi dan keterkaitan terkait dengan kebijakan melalui UU yang diterapkan pemerintah. Salah satunya seperti yang telah menjadi rekomendasi beberapa penelitian dan program kerja BKKBN adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yakni batasan usia minimal saat perkawinan adalah usia 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Adapun beberapa aspek yang menjadi keterbatasan penelitian ini adalah kajian ini belum memasukkan faktor latar belakang kondisi sosial ekonomi dari orang tua responden, kondisi sosial ekonomi dari pihak pasangan maupun akses teknologi dan informasi yang dimiliki oleh responden. Penelitian berikutnya harus dapat memasukkan beberapa unsur tersebut termasuk membandingkan keputusan usia menikah pertama bagi laki-laki dan perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan kajian yang telah dilakukan terhadap data sekunder dan primer tentang pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap usia kawin pertama (UKP) ditemukan bahwa:

- a. Faktor pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap usia kawin pertama (UKP). Hal ini berarti semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula usia kawin pertama.
- b. Status pekerjaan seseorang dapat menggambarkan kesempatan memperoleh pekerjaan suatu wilayah yang ditentukan oleh struktur ekonomi oleh suatu wilayah. Hasil penelitian menunjukkan status sudah memiliki pekerjaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap usia kawin pertama (UKP). Responden yang memiliki pekerjaan sebelum menikah memiliki usia kawin pertama lebih tinggi daripada yang tidak memiliki pekerjaan sebelum menikah.
- c. Domisili tempat tinggal memiliki pengaruh penting dalam pengembangan pola pikir dan gaya hidup seseorang. Hasil penelitian menunjukkan domisili letak tempat tinggal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap usia kawin pertama (UKP).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian tersebut di atas maka pemerintah sebagai pihak yang menetapkan kebijakan dan aturan dapat membuat kebijakan dan regulasi yang bersinergi antara satu bidang dan bidang lainnya. Kebijakan pemerintah melalui kebijakan terhadap pendidikan, akses terhadap pekerjaan, pengembangan sarana infrastruktur suatu daerah harus memiliki kesinambungan satu dan lainnya. Ukuran majunya suatu bentuk masyarakat harus dilihat tidak secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas terutama menyangkut kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki.

Hasil analisis dan simpulan di atas harus ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi bagi daerah dalam hal faktor sosial ekonomi terhadap usia kawin pertama (UKP). Rekomendasi ini diharapkan mampu memberikan solusi untuk dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan daerah:

1. Untuk pendewasaan usia perkawinan dilakukan melalui peningkatan kesadaran wajib sekolah bagi kalangan remaja. Selain itu pemerintah harus dapat mendorong kesempatan kerja bagi masyarakat karena melalui kesempatan kerja masyarakat dapat memiliki tatanan dan penghidupan yang lebih baik lagi.
2. Kota Gorontalo dan lima Kabupaten di daerah ini perlu adanya pemerataan sarana infrastruktur termasuk didalamnya teknologi dan informasi agar masyarakat memiliki akses dan kesempatan yang sama.

3. Mendorong instansi atau dinas terkait untuk lebih sering melakukan sosialisasi terhadap usia kawin pertama (UKP) bagi para generasi muda pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) maupun di Perguruan Tinggi (PT) di Provinsi Gorontalo.
4. Untuk meninjau kembali Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa usia minimum perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan pria adalah 19 tahun. Kemudian upaya menyesuaikan konsep Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun menjadi wajib belajar 12 tahun sehingga pemerintah dapat menanggulangi terjadinya pernikahan di usia perkawinan pertama yang masih sangat belia. Jika masyarakat di daerah Kabupaten dan Kota mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun maka tingginya angka kematian ibu yang diakibatkan oleh belum siapnya sang ibu untuk melahirkan karena usia yang masih muda (belia) dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, 1993. Agama dan Perubahan Sosial. Rajawali Press. Jakarta.
- Asmin, 1974. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. PT. Dian Rakyat, Jakarta, Hlm 19.
- Becker, 1995. An Economic Analysis of Fertility. Dalam The Essence of B.E.C.K.E.R. Ramon Febrero dan Pedro S. Schwartz. Hoover Institution Press. Stanford University, Stanford, California
- Budihardjo, Eko, 2005. Sejumlah Masalah Pemukiman Kota. Bandung,
- BPS, 2014. Indikator Kesejahteraan rakyat Provinsi Gorontalo tahun 2012. Provinsi Gorontalo.
- Hilman, Adikusuma, 1990. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Mandar Maju. Cetakan 1. Bandung.
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Gorontalo Triwulan IV 2013, 2014, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Gorontalo.
- Nani Suwondo, 1970. Kedudukan Wanita Indonesia. PT Tintamas. Jakarta.
- Natsir, Mohammad, 2012, Analisis Faktor-faktor Ekonomi dan Sosial yang mempengaruhi Fertilitas di Provinsi Aceh, Jurnal Ekonomika Indonesia, Vol 1, No 1.
- Mardiya, 2010. Pendewasaan Usia Perkawinan. <http://mardiya.wordpress.com/2010/12/03/pendewasaan-usia-perkawinan-oleh-drs-mardiya/> diunduh September 2014
- Mulyanto, Hans, 1995. Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, Rajawali Press, Jakarta.
- Rafidah, Ova Emilia, Budi Wahyuni, 2009. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Berita Kedokteran Masyarakat, Vol. 25, No. 2. <file:///C:/Users/UNG/Downloads/3564-6015-1-PB.pdf>, di unduh 21 September 2014.
- Sekarningrum, 2002. Perilaku Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Muda Di Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan Tahun

1999. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.
- Sriudiyani dan Soebijanto, 2011, Perkawinan muda di kalangan perempuan, *Policy Brief*, Seri I No.6/Pusdu-BKKBN/Desember 2011.
- Suandi, 2002, Status sosial ekonomi dan fertilitas: A latent variable approach, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Jambi.
- Tren Fertilitas dan Keluarga Berencana Tahun 2006 – 2012, 2013, *Fact Sheet*, BKKBN Provinsi Gorontalo.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Perkawinan N0.1 Tahun 1974
- Vaizey, Jhon, 1989. Pendidikan di Dunia Modern. Gunung Agung. Jakarta.
- Vu, Lung. 2005. *Age at First Marriage in Vietnam : Trends and Determinants*. Tulane University Scholl of Public and Tropical Medicine.
- Wirjono Prodjodikoro (1984). Hukum Perkawinan di Indonesia. Sumur Bandung. Bandung. hlm 7.

Lampiran 1

UJI ASUMSI KLASIK

NPar Tests: Uji normalitas Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		148
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06724052
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.093
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		1.132
Asymp. Sig. (2-tailed)		.154
a. Test distribution is Normal.		

Lampiran 2.

Regresi Model

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Ttgl, Pkjn, Pdkn ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: UKP

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1					

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.200	3	.067	14.461	.000 ^a
	Residual	.665	144	.005		
	Total	.865	147			

a. Predictors: (Constant), Ttgl, Pkjn, Pdkn

b. Dependent Variable: UKP

1	.481 ^a	.232	.216	.06794	1.930
---	-------------------	------	------	--------	-------

a. Predictors: (Constant), Ttgl, Pkjn, Pdkn

b. Dependent Variable: UKP

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.089	.035		31.272	.000		
Pdkn	.211	.038	.416	5.599	.000	.965	1.037
Pkjn	.026	.013	.149	2.023	.045	.984	1.017
Ttgl	.014	.012	.089	1.205	.230	.970	1.031

a. Dependent Variable: UKP

Coefficient Correlations^a

Model		Ttgl	Pkjn	Pdkn
1	Correlations	Ttgl	1.000	-.066
		Pkjn	-.066	1.000
		Pdkn	-.153	-.099
	Covariances	Ttgl	.000	-1.029E-5
		Pkjn	-1.029E-5	.000
		Pdkn	-6.944E-5	-4.841E-5

a. Dependent Variable: UKP

Collinearity Diagnostics^a

Model Dimen	Eigenvalu	Condition	Variance Proportions
-------------	-----------	-----------	----------------------

	sion	e	Index	(Constant)	Pdkn	Pkjn	Ttgl
1	1	2.808	1.000	.00	.00	.04	.05
	2	.667	2.051	.00	.00	.84	.20
	3	.512	2.342	.01	.01	.12	.74
	4	.013	14.825	.99	.99	.00	.01

a. Dependent Variable: UKP

Residuals Statistics^a

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.1902	1.3847	1.2966	.03691	148
Std. Predicted Value	-2.883	2.385	.000	1.000	148
Standard Error of Predicted Value	.008	.021	.011	.003	148
Adjusted Predicted Value	1.1807	1.3830	1.2965	.03705	148
Residual	-.13992	.22742	.00000	.06724	148
Std. Residual	-2.060	3.348	.000	.990	148
Stud. Residual	-2.077	3.369	.001	1.003	148
Deleted Residual	-.14230	.23039	.00013	.06900	148
Stud. Deleted Residual	-2.102	3.498	.004	1.011	148
Mahal. Distance	.902	13.245	2.980	2.048	148
Cook's Distance	.000	.073	.007	.010	148
Centered Leverage Value	.006	.090	.020	.014	148

a. Dependent Variable: UKP

QUISSIONER SURVEY KAJIAN FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG BERDAMPAK PADA USIA PERKAWINAN PERTAMA

NO	NAMA RESPONDEN	ALAMAT	BLOK I							BLOK 2												
			101	102	103	104	105	106	107	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	210A	211	
1	ANTI ALUNGGA	DUNGGALA	26	26	1	3	1	3	1	20	20	6	1.5	2	0	1	6	1	1	1	1	2
2	ERNA MANGGIO	DUNGGALA	39	40	1	4	1	2	1	20	21	19	1	2	-	1	1	1	1	1	1	6
3	FATMA BUNTONA	DUNGGALA	46	45	1	4	1	3	1	27	26	19	1.8	1	6	2	0	1	4	3	4.5	6
4	SIMON MANGGIO	DUNGGALA	42	44	1	4	1	4	1	29	31	10	1	2	-	2	0	1	2	2	6	6
5	NURFATRA YUNUS	DUNGGALA	19	22	1	3	1	3	1	15	18	4	1.6	2	-	2	0	1	2	2	2	2
6	HADIJA NUSI	DUNGGALA	54	61	1	3	1	2	1	22	29	32	1.2	2	-	1	1	1	3	3	6	6
7	LIN SULEMAN	DUNGGALA	21	29	1	3	1	3	1	17	25	4	1.5	2	0	2	-	1	1	1	1	1
8	ASNI B. TAUWA	DUNGGALA	43	41	1	3	1	2	1	18	16	26	1.5	2	-	1	1	1	5	4	6	6
9	YULIANTI S. PAKAYA	DUNGGALA	21	24	1	4	1	2	1	21	23	0	1.5	2	-	2	0	2	0	0	0	0
10	FATMA DJO	DUNGGALA	23	25	1	4	1	2	1	21	23	2	1.2	2	-	1	6	1	1	1	1	1
11	ATIN SAYEDE	DUNGGALA	30	30	1	2	1	2	1	16	16	14	1.5	2	-	2	-	1	2	2	4	4
12	HADIJA SEYE	DUNGGALA	36	39	1	1	1	2	1	16	23	16	1	2	-	2	-	1	4	3	5.6	5.6
13	MUH. ALWI P. SUPU	DUNGGALA	36	43	1	3	1	4	1	18	25	18	2.5	2	-	1	6	1	2	2	2	5
14	YENNI	DUNGGALA	39	45	1	3	1	2	1	17	23	22	3.5	2	-	2	-	1	3	3	5.6,8	5.6,8
15	GANI TOLULLI	DUNGGALA	45	51	2	-	1	2	1	15	21	30	3.5	2	-	2	-	1	5	5	4.5	4.5
16	ERLIN IMANI	DUNGGALA	26	28	1	2	1	3	1	15	17	11	1.5	2	-	2	-	1	2	2	1.4	1.4
17	ARSIN MALANJA	DUNGGALA	33	39	1	4	1	4	1	16	17	17	1.2	2	-	2	-	1	5	4	4.5,6	4.5,6
18	FARIDA N. ENA	DUNGGALA	45	51	1	3	1	1	1	19	25	26	2.5	2	-	1	4	1	3	3	6	6
19	NING BUNTONA	DUNGGALA	41	42	1	2	1	2	1	25	26	16	2	2	-	2	-	1	2	1	5	5
20	SUWIRNA HULUKATI	BULILA	33	34	1	4	1	3	1	21	22	13	1	2	-	2	-	1	4	3	2.4	2.4
21	GAFAR LIHIA	BULILA	33	31	1	5	1	1	1	26	24	7	1	1	6	2	-	1	2	2	1.4	1.4
22	YANTI USMAN	BULILA	33	36	1	3	1	2	1	16	19	18	1	2	-	1	6	1	4	4	4.5	4.5
23	HARSON GOBEL	BULILA	45	42	1	2	1	4	1	22	19	24	1	2	-	2	-	1	2	2	4.6	4.6
24	MARIKO MOCTALU	BULILA	43	48	1	4	1	3	1	19	24	24	1.5	2	-	1	5	1	2	2	2	6
25	ERRIN BAHANTIA	BULILA	35	35	1	6	1	6	1	27	27	8	1.3	1	5	-	1	2	2	2	2	2.4